

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di tengah kerumunan masyarakat yang heterogen, seseorang perlu memiliki identitas untuk dapat menjelaskan konsep diri mereka. Identitas diri merupakan cara seorang mengidentifikasi siapa mereka dan posisi mereka di dalam masyarakat. Identitas diri berakar pada struktur formal dan temporal dari pengalaman yang disengaja mendasari kesinambungan psikologis (Drummond, 2020). Identitas pribadi, berawal dari isi aliran pengalaman tertentu, khususnya dalam keyakinan yang diadopsi oleh individu. Darling (2013) mengatakan bahwa konsep diri seseorang berasal dari definisi yang dia terima dari berinteraksi dalam masyarakat. Individu akan melihat dan menilai identitas diri mereka selayaknya orang lain melihat mereka.

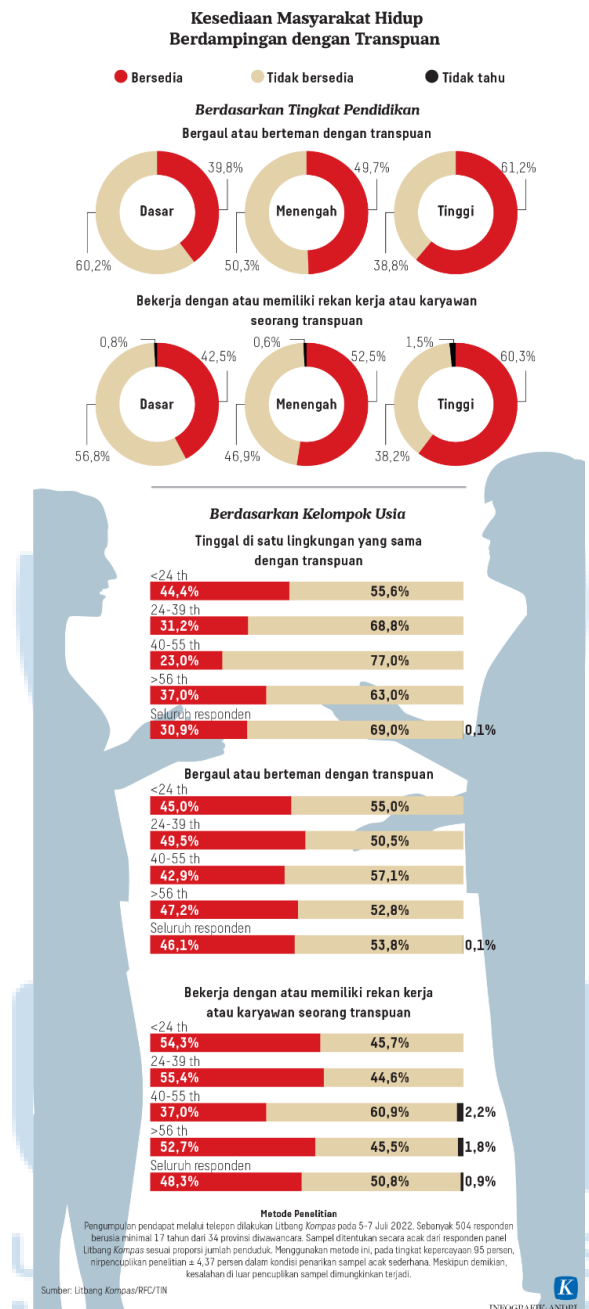
Krisis identitas gender atau *Gender Dysphoria* menurut NHS UK (2020) adalah perasaan tidak nyaman atau tertekan yang mungkin terjadi pada individu dengan identitas gendernya tidak sama dari jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Beberapa gejala *gender dysphoria* menurut Mayo Clinic (2022) terdiri dari; perbedaan identitas gender dan alat kelamin bawaan dari lahir dengan ekspektasi akan gender dan alat kelamin yang diinginkan seseorang; keinginan kuat untuk menghilangkan alat kelamin bawaan dan memiliki alat kelamin gender lain; keinginan kuat untuk diperlakukan selayaknya gender lain; keyakinan kuat untuk memiliki perasaan tipikal terhadap gender lain.

Transpuan adalah seseorang yang terlahir dengan alat kelamin dan juga identitas gender sebagai laki-laki namun merasa dirinya seharusnya adalah seorang perempuan. Seperti yang dikatakan oleh Icha kepada Detikjateng (Romadhon, 2022) “Dari awal konsultasi kurang lebih habis seratus juta, aku ingin dikabulkan permohonan ganti kelamin, aku memang menderita krisis

identitas gender. Krisis identitas gender biasa dialami oleh kelompok transpuan saat proses menemukan jati diri. Contoh lain tentang pengalaman krisis identitas oleh transpuan dapat dilihat dari video edukatif berjudul “Cerita Mereka Tentang Menjadi Seorang Transpuan” (Manusia, 2020) dimana tiga orang transpuan, Mama Atta, Wanti, dan Metha menceritakan pengalaman mereka mengalami kehilangan arah dan kebingungan di awal hidup mereka dikarenakan gender bawaan mereka.

Mengutip kembali dari Darling (2013) yang mengatakan bahwa identitas diri berakar dari persepsi masyarakat dan orang lain terhadap kita, tentu saja para transpuan juga mengalami kesulitan menerima jati diri mereka. Hal ini dikarenakan ekspektasi dari lingkungan mereka bahwa sejatinya mereka adalah seorang laki-laki dikarenakan terlahir dengan alat kelamin laki-laki, sedangkan dari dalam dirinya merasa bahwa mereka seorang perempuan.

Berdasarkan penelitian dari Kompas (Purwanti, 2022), ditemukan bahwa penolakan terhadap transpuan sudah muncul dari lingkungan keluarga. 46,8% responden merasa bahwa transpuan memiliki citra buruk, 45,2% merasa netral sedangkan hanya 6,6% yang merasa transpuan memiliki citra baik.



Gambar 0.1 Ketersediaan Masyarakat Hidup Berdampingan dengan Transpuan
 Sumber: Kompas.id

Berdasarkan Gambar 1.1 yang bersumber dari Kompas di atas menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat tidak nyaman untuk tinggal berdampingan dengan transpuan. Di mata publik, menjadi transpuan merupakan tindakan menyimpang dan diluar kondisi normal. Normal dalam artian hidup sesuai dengan ‘yang sudah biasa terjadi’. Paradigma yang membedakan transpuan dengan

masyarakat pada umumnya berakar dari perbedaan tata nilai yang dianut. Di mana masyarakat memiliki pendapat bahwa di dunia ini, gender hanya ada dua dan semua orang lahir sesuai dengan gender yang ditetapkan. Perbedaan pandangan akan nilai gender mendorong masyarakat untuk memojokkan, mengucilkan, merundung, hingga mencelakai kelompok transpuan.

Mengutip dari Mama Yuli, salah satu kepala dari Komunitas Transpuan Lansia bahwa 80-90% temannya (transpuan) merasa hidup mereka seperti orang yang mati perlahan-lahan (Nugroho, 2022). Pernyataan Mama Yuli merupakan salah satu bukti bahwa transpuan mengalami diskriminasi setiap hari sehingga mereka kehilangan hak yang mendasar bagi mereka.

Dipersatukan oleh nasib perjuangan yang sama, banyak transpuan yang saling mendukung satu sama lain dan membangun komunitas. Beberapa komunitas transpuan yang terbentuk di Indonesia terdiri dari Sanggar Swara, Komunitas Transpuan Lansia, dan masih banyak lagi (Lesmana, 2022). Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyaknya transpuan yang tidak tergabung dan terlindungi oleh komunitas. Para transpuan yang berdiri dan bertahan hidup sendiri memiliki pengalaman yang lebih susah ketimbang mereka yang berada dalam suatu komunitas. Tanpa proteksi dari komunitas, mereka terpaksa hidup menjalani diskriminasi dari masyarakat sendirian. Kerentanan hidup mereka mendorong mereka untuk lebih banyak menjaga privasi untuk alasan keselamatan.

Office of the Australian Information Commissioner mendeskripsikan privasi sebagai hak asasi manusia yang mendasari kebebasan berserikat, berpikir dan berekspresi, serta kebebasan dari diskriminasi (Office of the Australian Information Commissioner, n.d.). Berdasarkan penjelasan dari OAIC, dapat disimpulkan bahwa informasi privat yang kemudian menjadi privasi merupakan hak dasar manusia yang seharusnya membebaskan individu dari tindakan diskriminasi. Meskipun hak privasi seharusnya milik semua umat manusia, kenyataannya masih banyak transpuan yang merasakan kehilangan hak privasi mereka dikarenakan diskriminasi.

Jalan untuk hak privasi dapat dilakukan oleh seorang transpuan mulai dari pengaturan cara mengkomunikasikan informasi privat seperti identitas gender mereka. Proses pengelolaan komunikasi perihal informasi privat bukanlah hal yang mudah. Salah satu turunan dari teori *self disclosure*, ada yang membahas tahapan individu untuk mengelola informasi privat. Teori yang dimaksud adalah *Communication Privacy Management* dari Petronio (Petronio, Child, & Hall, 2021). Menggunakan langkah-langkah mengelola komunikasi privasi dari Petronio, peneliti dapat meneliti lebih dalam tindakan yang dilakukan oleh individu transpuan sebagai cara preventif menangani diskriminasi sosial.

Sesuai dengan elaborasi data dan pendapat di atas, peneliti tertarik untuk melakukan riset Manajemen komunikasi privasi (*Communication Privacy Management*) yang dilakukan oleh individu transpuan sebagai cara untuk menghadapi tindakan diskriminasi oleh masyarakat. Peneliti tergerak untuk meneliti individu transpuan yang tidak tergabung dalam komunitas transpuan sebagai subjek penelitian karena mereka adalah kelompok transpuan yang paling minim mendapatkan keamanan.

Peneliti akan menggunakan teori manajemen komunikasi privasi dengan pendekatan kualitatif deskriptif, untuk menggambarkan proses pengelolaan privasi komunikasi para individu transpuan di Jabodetabek. Metode yang hendak digunakan oleh peneliti adalah studi kasus.

1.2 Rumusan Masalah

Seorang transpuan yang berjuang sendiri menghadapi diskriminasi perlu menentukan strategi pintar dan kuat demi menjaga keamanan dan memperoleh hak dasar mereka. Strategi tersebut dapat dimulai dari bagaimana cara mereka mengkomunikasikan ke dunia bahwa mereka adalah seorang transpuan, dan bagaimana mereka menjaga privasi mengenai identitas diri mereka. Identitas *queer* (transgender), apalagi yang belum disebarluaskan ke dunia, dapat dikonsiderasi sebagai informasi yang amat personal (Pecoraro, 2020). Informasi personal ini apabila dipublikasikan tanpa arahan yang baik akan mengancam keamanan pemilik informasi tersebut (transpuan).

Penelitian ini menggunakan teori Manajemen komunikasi privasi (CPM) sebagai landasan. CPM sebagai sebuah teori yang dicetuskan oleh Sandra Petronio untuk mengatur tahapan seseorang dalam mengelola privasi komunikasi mereka. CPM dirancang untuk mengembangkan pemahaman berbasis bukti tentang bagaimana orang mengatur pengungkapan dan penyembunyian informasi pribadi (Petronio, Child, & Hall, 2021).

Berpacu pada tindakan diskriminasi oleh masyarakat kepada transpuan dan keterpaksaan mereka (transpuan) untuk membaaur secara sosial (terutama di kota-kota besar seperti Jabodetabek), seorang transpuan perlu memiliki rencana kompleks untuk menjaga privasi mereka. Peneliti merasa teori CPM sesuai untuk mengukur pengelolaan privasi komunikasi seorang transpuan sebagai salah satu upaya menghadapi diskriminasi.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berlandaskan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka pertanyaan akan penelitian ini yaitu:

- 1) Bagaimana individu transpuan melakukan proses manajemen komunikasi privasi (*communication privacy management*) sebagai upaya menghadapi diskriminasi?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan akan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui proses manajemen komunikasi privasi (*communication privacy management*) yang dilakukan oleh individu transpuan sebagai upaya menghadapi diskriminasi.

1.5 Kegunaan Penelitian

Peneliti mengharapkan penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, seperti;

1.5.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini ditujukan agar bisa sebagai salah satu bahan pembelajaran baru mengenai manajemen komunikasi privasi (*communication privacy management*) seorang transpuan dalam Ilmu Komunikasi, dan dapat di eksplorasi lebih dalam untuk menjadi riset lanjutan yang menyeluruh.

1.5.2 Kegunaan Sosial

Penelitian ini ditujukan agar bisa membuka pandangan masyarakat luar terhadap tindakan diskriminasi yang dirasakan individu transpuan. Penelitian ini diharapkan dapat membuka jalur komunikasi antara masyarakat dengan transpuan

